

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH
Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN
070/REG/VI/318/12/2016

KETUA PROGRAM STUDI
19 DESEMBER 2016

Nomor : **238/A.4-II/XII/2016**
Perihal : **IJIN PENELITIAN/RISET**

- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
- 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011, tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- 3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:
ANEDYA ALVINCA ELMANDA NIP/NIM : **20130610045**

FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
PENYELESAIAN SENGKETA PEMBATALAN HIBAH DAN AKIBAT HUKUMNYA DI PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 0487/PDT.G/2012/PA.YK)

19 DESEMBER 2016 s.d 19 MARET 2017

Surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Daerah DIY kepada ... melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
 ... soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY ...
 ... disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjaprovg.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan ...
 ... cap institusi;
 ... dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
 ... dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan ...
 ... melalui website adbang.jogjaprovg.go.id;
 ... dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta
Pada tanggal **19 DESEMBER 2016**
A.n Sekretaris Daerah
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Ub.
Kepala Biro Administrasi Pembangunan



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (SEBAGAI LAPORAN)
KOTA YOGYAKARTA C.Q DINAS PERIJINAN KOTA YOGYAKARTA
PROGRAM STUDI, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
BERSANGKUTAN

PEMERINTAHAN KOTA YOGYAKARTA
DINAS PERIZINAN

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 514448, 515865, 515865, 515866, 562682
Fax (0274) 555241
E-MAIL : perizinan@logjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081227625000 HOT LINE EMAIL : udik@logjakota.go.id
WEBSITE : www.perizinan.logjakota.go.id

SURAT IZIN

NOMOR : 070/4141

8339/34

Dari Surat : Dari Surat izin/ Rekomendasi dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor : 070/REG/W/318/12/2016 Tanggal : 19 Desember 2016

- Dasar : 1. Peraturan Gubernur Daerah istimewa Yogyakarta Nomor : 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah;
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;
5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;

Kepada : Nama : PRANEDYA ALVINCA ELMANDA
No. Mhs/ NIM : 20130610045
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Hukum - UMY
Alamat : Jl. Lingkar Barat, Tamantirto, Kasihan, Bantul Yk
Penanggungjawab : Dr. Leli Joko Suryono, S.H., M.Hum.
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal : PENYELESAIAN SENGKETA PEMBATALAN HIBAH DAN AKIBAT HUKUMNYA DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA (Studi Kasus Putusan Nomor 0487/Pdt.G/2012/PA.YK)

Responden : Kota Yogyakarta
: 19 Desember 2016 s/d 19 Maret 2017
: Proposal dan Daftar Pertanyaan

- Ketentuan : 1. Wajib Memberikan Laporan hasil Penelitian berupa CD kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kesetabilan pemerintahan dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan tersebut diatas

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintahan setempat dapat memberikan bantuan seperlunya

Tanda Tangan Pemegang Izin

PRANEDYA ALVINCA ELMANDA

Kepada : Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)
Biro Administrasi Pembangunan DIY
Pengadilan Agama Kota Yogyakarta

Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 20 Desember 2016
Kepala Dinas Perizinan
Sekretaris





PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

Jl. Ipda Tut Harsono No.53 Telp. (0274) 552997 Fax. (0274) 552998 Yogyakarta
Homepage: <http://pa-yogyakarta.net>
Email : admin@pa-yogyakarta.net; pa_yogyakarta@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : W12.A1/ 747 /Hm.00/III/2017

Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta menerangkan bahwa :

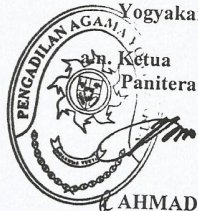
N a m a : PRANEDYA ALVINCA ELMANDA
NIM : 20130610045
Fakultas : Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah melaksanakan tugas riset/penelitian pada kantor kami dengan wawancara sebagai bahan untuk keperluan menyusun skripsi dengan judul :

“PENYELESAIAN SENGKETA PEMBATALAN HIBAH DAN AKIBAT HUKUMNYA DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA (STUDI PUTUSAN NOMOR 0487/Pdt.G/2012/PA.Yk)”

Demikian surat keterangan ini kami buat agar yang bersangkutan maklum dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 02 Maret 2017



AHMADI, SH